



Media: Republika

Hari: Sabtu

Tanggal: 27 Maret 2021

Halaman: 5

Kota Yogyakarta Segera Lakukan Pendataan Keluarga

YOGYAKARTA — Pemerintah Kota Yogyakarta bakal melaksanakan proses pendataan keluarga di wilayah setempat. Wakil Wali Kota Yogyakarta, Heroe Poerwadi, menguraikan adanya pendataan keluarga ini menjadi kesempatan untuk memotret kondisi keluarga di Kota Yogyakarta, terutama di saat pandemi Covid-19 yang masih terjadi.

Hal itu disampaikan Heroe saat memberikan sosialisasi kepada jajaran dan perangkat kelurahan yang dilaksanakan di Balai Kota Yogyakarta secara daring. Kegiatan tersebut sekaligus tercantum dalam Undang-Undang No 52

Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga yang diperkuat dengan Peraturan Pemerintah No 87 Tahun 2014 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga, Keluarga Berencana, serta Sistem Informasi Keluarga.

"Harapannya, dengan satu kesatuan data yang akan dianalisis bersama ini nanti menjadi sumber data yang apabila diperlukan bisa diandalkan sesuai dengan kebutuhan," ujar Heroe Poerwadi.

Proses pendataan keluarga akan dilaksanakan mulai 1 April 2021 menda-

tang. Nantinya, bakal diawali oleh wali kota dan wakil wali kota dan akan dilanjutkan kepada 97.242 Kepala Keluarga (KK) yang ada di Kota Yogyakarta.

Heroe Poerwadi juga mengharapkan agar pendataan ini benar-benar bisa merepresentasikan kondisi nyata di masing-masing keluarga. Pemkot meminta dukungan di setiap tingkat pemerintahan mulai dari RT/ RW, kelurahan, hingga kecamatan untuk membantu proses pendataan.

Dengan demikian, data yang diperoleh memiliki nilai akurasi yang tinggi dan valid. "Pun, adanya pelaksanaan

pendataan keluarga ini guna mengaktualisasi data di tengah adanya pandemi Covid-19," ujarnya.

Selain itu, pendataan ini merupakan upaya Pemerintah Kota Yogyakarta bersama BKKBN guna mengidentifikasi lebih jelas terkait pendataan status dan misli juga status keluarga.

"Adanya pandemi Covid-19 mungkin berpengaruh pada sosial ekonomi masyarakat. Hal ini bisa menjadi bagian penting yang akan dikoreksi untuk pengambilan kebijakan yang akan dilakukan guna pemulihan ekonomi sosial keluarga," ungkap dia.

Sebelumnya, Komisi D DPRD Kota Yogyakarta menyoroti pentingnya keterbukaan sistem pendataan dalam proses pendataan warga miskin yang akan dimasukkan dalam data keluarga sasaran jaminan perlindungan sosial daerah itu pada 2021 guna memudahkan pemantauan dan evaluasi publik.

"Kami masih menerima banyak masukan tentang ketidaktepatan pendataan keluarga sasaran jaminan perlindungan sosial (KSJPS) yang selama ini dilakukan pemerintah daerah," kata Sekretaris Komisi D DPRD Kota Yogyakarta Krisnadi. ■ antara/my34.ed : yusuf assidiq

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan	Netral	Biasa	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 06 September 2026
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005